

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

PANGHURIAN

01111003055

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : Panghurian
Nim : 01111003092
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 September 2015

Ketua : Ermadiani, SE, MM, Ak, CA

NIP : 196608201994022001

Tanggal : 23 September 2015

Anggota: Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak, CA

NIP : 197802102001122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

DISUSUN OLEH:

NAMA : PANGHURIAN

NIM : 01111003092

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI

BIDANG KAJIAN : PERPAJAKAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 19 Oktober 2015

Ketua

Anggota

Anggota

Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP 19660820 199402 2 001

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP 19780210 200112 2 001

Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP 19620507 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA
NIP 19740511 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa : Panghurian
NIM : 01111003092
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul:

Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pembimbing

Ketua : Ermadiani, S.E, M.M, Ak. CA.
Anggota : Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak. CA.
Tanggal Ujian : 19 Oktober 2015

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Inderalaya, 19 Oktober 2015

Pembuat Pernyataan

Panghurian

NIM. 01111003092

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

*Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*

[QS Al-Insyiroh: 5-7]

Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Seungguhnya

Allah Maha mengetahui segala sesuatu [QS Al-Baqoroh: 282]

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- **KEDUA ORANG TUA TERCINTA**
- **SELURUH KELUARGA BESARKU**
- **SAHABAT-SAHABATKU**
- **ALMAMATERKU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**”. Penulisan skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itulah, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT.
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., Ph.D., beserta jajaran pengurus Rektorat lainnya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. H. Taufiq Marwah, S.E., M.Si.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak, CA, dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Ibu Hj. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak.
5. Dosen Pembimbing I, Ibu Ermadiani S.E., M.M., Ak, CA, dan Dosen Pembimbing II, Ibu Ika Sasti Ferina S.E., M.Si., Ak, CA, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama ini dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dosen Penguji, Bapak Abukosim, S.E., M.M., Ak, penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah banyak membantu saya menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orangtuaku tercinta, Arsyad dan Mariah RA. Terima kasih atas doa dan cinta kasih yang tak akan terhenti sepanjang masa.
10. Adikku tersayang, Kelvin Radu. Ayukku tersayang Berti Novita. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuannya.
11. Nurul Fitria, atas semangat, perhatian dan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Armanda, Chandra, Ummi Rachmawati, Elfrida, Diba, terimakasih atas bantuannya selama mengerjakan skripsi.
13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsri Indralaya angkatan 2011. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di kemudian hari.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Inderalaya, 25 Oktober 2015

Penulis

Panghurian

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Oleh :
Panghurian

Kota Palembang yang merupakan salah satu kota yang strategis dan menjadi tujuan baik wisata, kuliner, budaya, dan pendidikan. Perhotelan dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan andalan bagi Kota Palembang sebagai pendapatan untuk daerah. Pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan andalan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang baik untuk dijalankan. Baik dari segi pendaftaran, pendataan, penetapan, penyetoran, pembukuan, penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel serta pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 dan berjalan dengan baik. Efektivitas serta prospek penerimaan juga telah berjalan sangat efektif. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pemungutan di bagian pendataan dan pendaftaran serta bagian pembukuan dan pelaporan yang menjalankan fungsi tidak maksimal sehingga menimbulkan celah untuk berbuat curang bagi karyawan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah pemisahan fungsi pendaftaran dan pendataan serta fungsi pembukuan dan fungsi pelaporan agar dapat menjalankan fungsi secara maksimal dan meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi.

Kata kunci: *Sistem dan Prosedur, Pelaksanaan Pemungutan, Pajak Hotel*

Ketua,

Anggota,

Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP: 19660820 199402 2 001

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP: 19780210 200112 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A, Ak, CA
NIP.19740511 199903 2 001

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION DISPENDA HOTEL IN THE CITY OF PALEMBANG

Oleh :
Panghurian

Palembang is one of the strategic city and becomes a good tourist destination, culinary, culture and education. Hospitality is considered as one source of revenue mainstay for the region. Hotel taxes as a source of revenue has good systems and procedures to run, both in terms of enrollment, data collection, determination, deposit bookkeeping, billing. This study aims to describe the implementation of system and procedures and the implementation of hotel tax collection in dispenda Palembang. This types of research used is descriptive qualitative. Result from this study indicated that the systems and compliance with local regulation number 11 of 2010 and going is well. Effectiveness and prospects reception also was effective. However, still found deficiencies in the implementation of the collection of data and the registration section as well as parts of accounting and reporting function is not a maximum, causing the gap to cheat for employees. Advice can be given to the weaknesses found are the separation of the functions of accounting and reporting function optimally and minimize fraud that may occur.

Key words : Systems and procedures for collection, hotel tax.

Ketua,

Anggota,

Ermadiani, SE., MM., Ak, CA
NIP: 19660820 199402 2 001

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP: 19780210 200112 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A, Ak, CA
NIP.19740511 199903 2 001

Riwayat Hidup

Personal Information

Nama	Panghurian
Tempat/ Tanggal lahir	Palembang, 10 Mei 1993
Address	Tulus Ayu Rt 11 Rw 3 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Status	Mahasiwa
Alamat Email	Panghurian18@gmail.com

Penddikan Formal

2008 – 2011	Madrasah Aliyah Negeri Gumawang
2005 – 2008	SMP Negeri 1 Belitang
1998 – 2005	SD Negeri 1 Tulus Ayu

Nonformal Education

2015	LAMI Komputer
-------------	----------------------

Organization Experiences

2015	Anggota Divisi Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GENBI)
2014 – 2015	Kepala Divisi Bina Desa dan Tanggap Bencana BEM KM UNSRI
2013 - 2014	Staff Kemendagri BEM KM UNSRI
2013 – 2014	Kepala Departemen Eksternal Ikatan Mahasiswa Belitang (IMB)
2012 - 2013	Kepala Biro OASIST BO. Ukhuwah FE Unsri

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Inderalaya, 29 Oktober 2015

Panghurian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori bakti	11
2.1.2. Pengertian Evaluasi	12
2.1.3. Pengertian Prosedur	12
2.2. Pajak	13
2.2.1. Pengertian Pajak	13
2.2.2. Fungsi Pajak	15
2.2.3. Tarif Pajak	15
2.2.4. Pengelompokan Pajak	16
2.2.5. Syarat Pemungutan Pajak	18
2.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak	19
2.2.7. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	22
2.2.8. Hambatan Pemungutan Pajak	23
2.3. Pajak Daerah	24
2.3.1. Pengertian Pajak Daerah	24
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	24
2.3.3. Jenis Pajak Daerah	25

2.3.4. Tarif Pajak Daerah.....	26
2.4. Pajak Hotel.....	28
2.4.1. Dasar Hukum Pajak Hotel	28
2.4.2. Pengertian Pajak Hotel	29
2.4.3. Subjek Pajak Hotel	29
2.4.4. Objek Pajak Hotel	30
2.4.5. Penelitian Terdahulu	31
2.4.6. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	36
3.2. Jenis Penelitian.....	36
3.3. Sumber Data dan Jenis Data	36
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Dispenda.....	40
4.1.1. Sejarah Singkat Dispenda	40
4.1.2. Fungsi dan Tugas Pokok Dispenda	41
4.1.3. Visi dan Misi Dispenda	42
4.1.4. Struktur Organisasi Dispenda	43
4.1.5. Tata Kerja dan Uraian Tugas Dispenda.....	45
4.2. Analisa atas Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel pada Dispenda.....	50
4.2.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak	50
4.2.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak	53
4.2.3. Pembayaran Pajak.....	56
4.2.4. Penagihan Pajak	58
4.2.5. Pembukuan /Pelaporan Pajak.....	60
4.2.6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminitrasi	60
4.3. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel	61
4.3.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak	61
4.3.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	62
4.3.3. Pembayaran Pajak.....	63
4.3.4. Penagihan Pajak.....	63
4.3.5. Pembukuan/ Pelaporan Pajak	64
4.3.6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminitrasi	65
4.4. Efektivitas dan Prospek Penerimaan Pajak Hotel	66
4.4.1. Efektivitas Pajak hotel	66
4.4.2 Prospek Penerimaan Pajak hotel	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang 2007-2011	5
3.1. Kriteria Efektivitas	39
4.1. Efektivitas Pajak hotel	67
4.2. Trend Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel 2010-2014	70
4.3. Prospek Penerimaan Pajak Hotel 2015-2017	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
4.1. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan (Wajib Pajak)	50
4.2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan (Dispenda).....	51
4.3. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak	53
4.4. Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel	56
4.5. Tata Cara Penagihan Pajak Hotel	58
4.6. Grafik Efektivitas Pajak Hotel.....	68
4.7. Persamaan Rumus a dan b	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan bagi pemerintah diberbagai Negara didunia yang berpotensi dalam upaya meningkatkan dana dalam negeri tak terkecuali bagi Pemerintah Indonesia. Penerimaan dalam negeri tersebut digunakan untuk memenuhi pengelolaan dan pembiayaan suatu Pemerintahan yang membutuhkan sumber dana guna menjalankan Pemerintahannya. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan besar ataupun lemahnya partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan sebuah Negara.

Sebelum Reformasi, Pemerintah Indonesia ada pada masa pemerintahan Orde Baru yang menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik atau terpusat. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan dan pengelolaan suatu pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang bidang keuangan atau desentralisasi wewenang keuangan ke Daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya seefektif dan efisien mungkin dan juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah diharuskan dapat berperan dalam pengelolaan daerah itu sendiri termasuk

diantaranya dalam menjalankan pemerintahan dan masyarakat. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut, tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, biaya tersebut berasal dari pendapatan pemerintah termasuk diantaranya dari sektor pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dianggap sebagai salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Artinya, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka muncul istilah desentralisasi fiskal yang menggantikan tanggung jawab keuangan secara terpusat. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Kota Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan merupakan kota yang mampu bersaing dengan kota-kota lain dibidang perdagangan, industri maupun jasa. Fasilitas yang terbilang lengkap juga ada di Kota Palembang seperti Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Pelabuhan Boom Baru, dan pusat-pusat

perdagangan seperti Pasar 16 Ilir maupun Pasar Cinde yang menjadi pusat perdagangan maupun jasa di Kota Palembang. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari Kota Palembang itu sendiri maupun dari luar Kota Palembang yang menjalankan bisnisnya di Kota Palembang.

Palembang juga merupakan kota wisata, baik wisata sejarah maupun wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sering melakukan kunjungan wisata sejarah ke Benteng Kuto Besak, Pulau Kemaro, Jembatan Ampera yang menarik untuk dipelajari sejarahnya. Juga wisata kuliner khas Palembang yang memang sangat terkenal di Indonesia yakni berbagai jenis dan macam pempek.

Selain itu, Palembang juga merupakan salah satu tujuan pendidikan. Dimana terdapat perguruan tinggi negeri yang termasuk jajaran top di Indonesia dan juga banyak perguruan swasta yang menawarkan kelebihan masing-masing. Sehingga banyak terdapat mahasiswa baik berasal dari Kota Palembang sendiri maupun luar Kota Palembang yang menetap di Kota Palembang dalam menempuh pendidikannya.

Kota Palembang juga terbilang merupakan Kota yang strategis terbukti dengan banyaknya even internasional yang digelar dan akan digelar di Kota Palembang. Pada tahun 2011 lalu Pekan Olahraga di Asia Tenggara (Sea Games) telah digelar di Palembang. Kota Palembang juga ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga terbesar di Asia (Asian Games) pada tahun 2018 nanti.

Letak kota dan banyaknya even yang digelar Kota Palembang dan juga sebagai kota perdagangan, jasa, wisata, dan pendidikan akan mendorong tumbuh

kembangnya industri perhotelan maupun penginapan yang dianggap sebagai peluang bisnis yang menggiurkan dan menguntungkan. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak hotel.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang diperoleh data mengenai penerimaan pajak hotel kota Palembang yang setiap tahun mengalami peningkatan. Sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2.1

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang 2007-2011

Tahun	Target Pajak Hotek (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2007	5.400.000.000,00	4.954.301.974,00
2008	6.500.000.000,00	6.826.069.168,00
2009	7.700.000.000,00	10.353.748.458,60
2010	9.285.000.000,00	14.094.700.545,00
2011	16.50.664.650,00	18.596.699.903,00

Sumber: Dispenda Kota Palembang, 2015

Berdasarkan data diatas penerimaan daerah melalui pajak hotel dapat dikatakan mengalami prospek penerimaan dan efektivitas yang baik setiap tahunnya. Keberhasilan dalam pengelolaan pajak hotel ini tentu diharapkan terus mengalami progres positif setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Kabar lokal yakni Sriwijaya Post, telah diketahui adanya penyalahgunaan dan penyelewengan yang dilakukan Oknum dari Dinas Pendapatan Kota Palembang dalam pengelolaan penerimaan pajak di Kota Palembang tentunya menjadi isu yang hangat baru-baru ini. Hal ini diduga

dilakukan oleh Oknum dari dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang melakukan penyelewengan. Oknum ini diguga menggelapkan Pajak Hotel Sahid Imara dan Hotel Djayakarta Daira yang disetorkan oleh wajib pajak dan oknum ini statusnya telah ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan berkurangnya wewenang dan campur tangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana daerah oleh Pemerintah Daerah tentunya rawan penyelewengan dan juga bisa dianggap menimbulkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keadaan yang seperti ini tentunya akan menimbulkan kerugian diberbagai aspek. Disatu sisi daerah akan kehilangan Penerimaan atau pemasukan dan disisi lain masyarakat yang menjadi objek pajak akan kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah yang berdampak pada keengganan mereka untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Palembang dengan judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam yang akan dibuat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem dan prosedur pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel ?
2. Mengetahui pengevaluasian pelaksanaan pemungutan atas pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang ?
3. Mengetahui besaran efektivitas dan prospek penerimaan Pajak Hotel yang dipungut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang pendapatan dari Pajak Hotel ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Mengetahui dan memperoleh informasi tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2010.
2. Mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengevaluasian pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.

3. Mengetahui dan memperoleh informasi mengenai Efektivitas dan prospek penerimaan pajak hotel yang telah dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini akan digunakan sebagai penambah pengetahuan pembaca tentang bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan wawasan pembaca tentang pengevaluasian pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (Lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang ingin dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang berupa teori yang mendukung penelitian, terutama konsep dasar perpajakan, khususnya tentang pajak daerah yaitu pajak hotel, serta tinjauan atas penelitian lain yang relevan, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum/ deskripsi objek penelitian, mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang sesuai dengan peraturan daerah (Perda) No 11 tahun 2010, evaluasi pelaksanaan pemungutan atas pajak hotel yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, serta efektifitas pajak hotel dan prospek penerimaan pajak hotel selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010-2014.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengungkapkan penarikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diberikan penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE.
- Djarwanto. 2001. *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moekijat, 1989. *Tata Laksana Kantor*. Bandung : Alumni
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : YPAPI.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Palembang: Dispenda
- Sanusi, Achmad. 2002. *Pedoman Evaluasi Atas Laporan akuntabilitas Kinerja Unit-Unit Kerja di Lingkungan BPKP*. Bandung: BPKP.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:

Rajawali Press.

Sriwijaya Post. 14 Februari 2015. *Oknum Dispenda Beli Apartemen*, hlm. 15.

Undang-Undang Perpajakan No 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Jakarta.

Wakhinuddin. 2009. *Evaluasi Program dan Lembaga*. Wordpress.com.

Yani, Ahmad. 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.